



# RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026



BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KOTA MANADO

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur hanya bagi Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaanNya, sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kota Manado Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang sinergi dengan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih guna menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKAD Kota Manado, berdasarkan pada visi dan misi tersebut serta mengacu pada isu strategis dan tugas fungsi BKAD Kota Manado, maka dalam Renstra ini ditetapkanlah tujuan dan sasaran kinerja pelayanan BKAD Kota Manado beserta dengan indikator yang dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman, petunjuk dan arah pembangunan Kota Manado khususnya fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan selama periode 2021-2026.

Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak atas kerjasama dalam mendukung terselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Strategis BKAD Tahun 2021-2026 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati kita semua.

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MANADO,

PETER K. B. ASSA, ST.,M.Sc.,Ph.D  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670515 199403 1 003

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>P E N D A H U L U A N</b>	<b>5</b>
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
	2.2 Sumber Daya PD	11
	2.3 Kinerja Pelayanan PD	11
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	16
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PD</b>	<b>17</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	17
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	19
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	20
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>21</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>23</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>24</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>27</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>29</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Pembagian tugas sekretariat dan bidang pada BKAD Kota Manado	10
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD Kota Manado	12
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKAD Kota Manado	14
Tabel 3.1	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKAD	22
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	23
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKAD Kota Manado	
	Tahun 2021 - 2026	25
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai keleluasaan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota. RPJMD Tahun 2021 - 2026 telah mengakomodir rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih pada saat kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan capaian Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dijabarkan dalam perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah tentunya akan mengakomodir asas tersebut sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tahun 2021 – 2026 meliputi :

1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado 2021 – 2026;
11. Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dalam melaksanakan pembangunan demi pencapaian tujuan bersama di Kota Manado untuk periode perencanaan tahun 2021 – 2026.

Tujuan penyusunan RENSTRA Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Manado ke dalam rumusan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan Kota Manado tahun 2021 – 2026;
2. Sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado disusun sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2.2 Sumber Daya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado merupakan salah satu Perangkat Daerah pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A: Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.

b. Fungsi

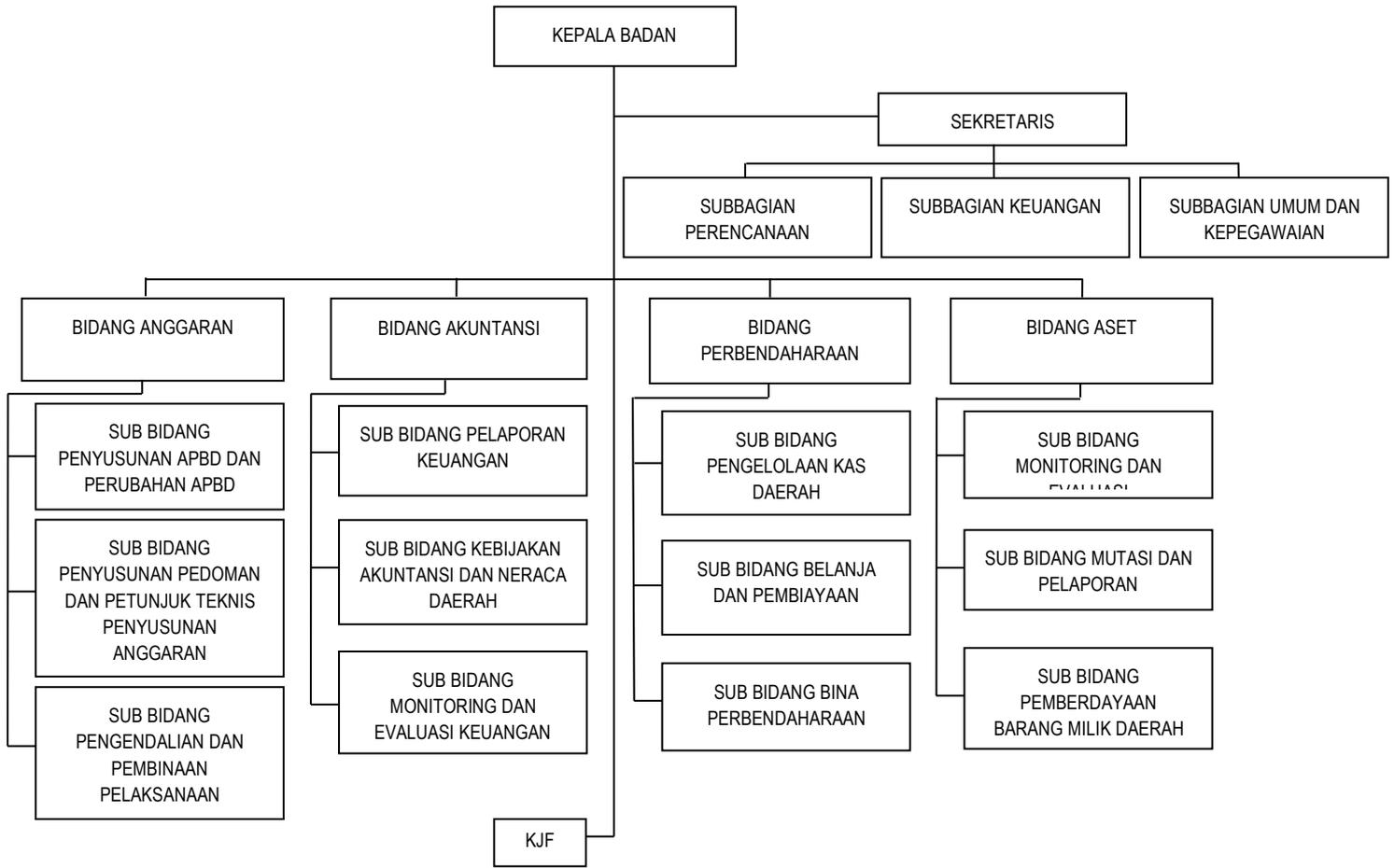
Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Tipe A**



## 2.2 Sumber Daya PD

Aparatur Sipil Negara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan
  - Golongan IV : 6 Orang
  - Golongan III : 64 Orang
  - Golongan II : 4 Orang
  - Golongan I : - Orang
- b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - Doktoral : 1 Orang
  - Pasca Sarjana : 5 Orang
  - Sarjana : 56 Orang
  - Diploma : 5 Orang
  - SLTA : 7 Orang
  - SLTP : - Orang
- c. Berdasarkan Jabatan Struktural
  - Eselon II B : 1 Orang
  - Eselon III A : 1 Orang
  - Eselon III B : 4 Orang
  - Eselon IV A : 15 Orang

Disamping itu didukung pula oleh tenaga honorer terdiri dari:

- a. Field Support : 1 Orang
- b. Tenaga administrasi : 42 Orang
- c. Petugas kebersihan : 2 Orang
- d. Sopir : 1 Orang

## 2.3 Kinerja Pelayanan PD

Adapun gambaran realisasi pencapaian target pelayanan perangkat daerah berdasarkan pada dokumen RPJMD/Renstra periode yang lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.1****Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase Pencapaian Target Perangkat Daerah		96%	96%	96%	97%	97%	84.17%	96.18%	92.13%	91.73%	-	87.68%	100.19%	95.97%	94.57%	-
2	Presentase Perencanaan dan Penganggaran Yang Terintegrasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Presentase Perencanaan dan Penganggaran Yang Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Presentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
5	Presentase Pemenuhan Proposal Hibah Yang Memenuhi Syarat		80%	85%	90%	95%	95%	26.43%	44.17%	85.29%	66.22%	-	33.04%	51.96%	94.77%	69.71%	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6	Presentase Pemenuhan Permohonan Bansos		80%	85%	90%	100%	100%	88.46%	74.46%	64.35%	92.86%	-	110.58%	87.60%	71.50%	92.86%	-
7	Presentase Realisasi Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan		80%	85%	90%	95%	95%	34.72%	60.29%	75.60%	66.11%	-	43.40%	70.93%	84.00%	69.59%	-
8	Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Berbasis Akrual		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
9	Tingkat Opini BPK Atas LKPD Kota Manado		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	-
10	Presentase Pengelolaan Aset Yang Tertib		80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	125%	111%	100%	100%	-

Lebih lanjut ditinjau dari sisi anggaran, untuk setiap program dalam selang waktu periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.2**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Admnsitrasi Perkantoran	2.260.957.750	3.264.690.200	4.654.331.000	3.383.962.000	-	2.036.165.743	3.056.953.009	4.411.885.065	3.262.635.970	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.241.556.800	2.402.169.800	1.720.129.000	1.157.480.000	-	1.121.208.965	2.343.490.016	1.481.462.824	1.040.972.634	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163.704.000	234.900.000	199.500.000	12.840.000	-	161.081.250	223.344.000	198.190.000	8.500.000	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.406.000	138.796.000	92.062.000	1.050.000	-	203.543.000	123.319.680	73.143.497	1.050.000	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	162.705.950	280.650.000	252.110.800	213.291.800	-	145.542.800	239.977.300	238.149.968	178.722.800	-
6	Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset Daerah	637.890.000	291.838.000	383.780.000	410.970.000	-	350.1421412	241.807.731	361.828.699	179.278.000	-
7	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.210.241.123	984.546.000	1.191.518.000	183.548.000	-	1.078.694.873	913.907.357	1.064.804.680	180.945.000	-
8	Program Pengelolaan Aset Daerah	1.004.226.000	1.205.117.000	1.410.783.000	874.049.000	-	538.888.100	920.134.854	1.195.637.042	540.234.960	-
9	Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.180.494.027	1.025.375.000	1.232.411.000	802.768.000	-	942.006.771	996.835.805	1.060.724.553	707.757.550	-
10	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	26.475.000	-	-	-	-	25.226.800	-	-	-	-
11	Program Penganggaran Keuangan Daerah	1.383.819.550	1.286.556.000	1.652.845.000	1.115.305.014	-	1.328.265.318	1.228.682.210	1.626.623.709	976.218.100	-
12	Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	1.074.226.000	1.077.701.000	1.415.633.000	1.046.000.061	-	1.023.203.855	987.679.491	1.344.268.774	959.476.025	-
13	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah	667.206.776	964.626.000	1.200.522.200	671.903.000	-	605.386.474	862.194.221	1.109.259.561	627.363.500	-
14	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	32.700.000	119.729.000	240.560.000	150.000.000	-	-	118.805.000	234.003.000	121.355.214	-
15	Program Pengelolaan Belanja Hibah,Bansos,Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan	436.750.000	561.925.000	606.169.000	383.267.200	-	321.949.020	519.467.512	573.876.750	379.436.320	-

No.	Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,90	0,94	0,95	0,96	-	20%	23%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,90	0,98	0,86	0,90	-	11%	14%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,98	0,95	0,99	0,66	-	(22%)	(23%)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,79	0,89	0,79	1,00	-	(60%)	(60%)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,89	0,86	0,94	0,84	-	16%	13%
6	Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset Daerah	0,55	0,83	0,94	0,44	-	(5%)	(11%)
7	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,89	0,93	0,89	0,99	-	(27%)	(27%)
8	Program Pengelolaan Aset Daerah	0,54	0,76	0,85	0,62	-	(0,32%)	15%
9	Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0,80	0,97	0,86	0,88	-	(9,27%)	(7%)
10	Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	0,95	-	-	-	-	-	-
11	Program Penganggaran Keuangan Daerah	0,96	0,96	0,98	0,88	-	(3,69%)	(5%)
12	Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	0,95	0,92	0,95	0,92	-	1,86%	1%
13	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perangkat Daerah	0,91	0,89	0,92	0,93	-	8,33%	9%
14	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	0,99	0,97	0,81	-	109,81%	16%
15	Program Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Belanja Tak Terduga dan Pembiayaan	0,74	0,92	0,95	0,99	-	(0,08%)	13%

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan, berikut tantangan yang dihadapi BKAD Kota Manado :

Tantangan :

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT
3. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang keuangan dan aset daerah
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan 45 benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD
5. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance
6. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi
7. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya
8. Dalam pemanfaatan aplikasi sebagai upaya mendukung e-government, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya antara lain proses bisnis yang belum terintegrasi dikarenakan masih rendahnya budaya berbagi informasi dan data antar perangkat daerah.

Peluang :

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BKAD, antara lain :

Faktor Internal		
No.	<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
1	Ketersediaan Aparatur yang cukup	Kurangnya Aparatur yang berlatar belakang pendidikan keuangan/ akuntansi
2	Sarana dan Prasarana yang memadai	Sistem Informasi (contohnya : fmis, SIPD) yang belum sempurna
3	Banyaknya Bimtek pengelolaan Keuangan	Rendahnya keinginan belajar dari Aparatur
4	Adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	Masih lemahnya koordinasi dalam proses perencanaan penganggaran baik inter maupun antar Perangkat Daerah dan atau pemangku kepentingan
5	Adanya komitmen dari Pimpinan	Belum optimalnya pengelolaan terhadap aset
6	Ketersediaan aplikasi yang mendorong efisiensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran	

Faktor Eksternal		
No.	<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
1	Banyak mitra pembimbing pengelolaan keuangan daerah (contohnya : BPKP, Kemendagri, dll)	Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan
2	Dukungan yang kuat dari BPK untuk meraih opini WTP	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implemetasi masih rendah
3	Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuanagn dan aset daerah	Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Pemerintah Kota Manado
4	Adanya upaya Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan aplikasi	Kemampuan Perangkat Daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan masih rendah

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja BKAD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

- a. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan keuangan dan aset daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan keuangan dan aset daerah kota Manado untuk mengimplementasikan kebijakan kebijakan baru baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh BKAD
- b. Kuantitas dan kualitas SDM BKAD sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan
- c. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat propinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan keuangan dan aset daerah seringkali masih belum selaras dan konsisten
- d. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Kualitas perencanaan keuangan perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SDM : kurang</li><li>• Sarana dan prasarana : kurang</li><li>• Keandalan SIPD : kurang</li><li>• Koordinasi : kurang</li></ul>
		Tertib administrasi keuangan belum sepenuhnya terpenuhi	
2	Belum optimalnya pengelolaan asset daerah	Akurasi pencatatan asset masih kurang	<ul style="list-style-type: none"><li>• SDM : kurang</li><li>• Kemampuan PD : kurang</li><li>• Koordinasi : kurang</li></ul>
		Pengawasan terhadap keberadaan dan status asset masih lemah	

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah “MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI BERANDA SULAWESI UTARA DAN INDONESIA KE ASIA PASIFIK”. Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kota Manado 2021-2026, dijabarkan dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yang disebut “Manado maju dan sejahtera” sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Kota Manado
2. Penguatan ekonomi Kota yang bertumpu kepada industry jasa, perdagangan dan pariwisata
3. Pembangunan infrastruktur, penataan kota dan perluasan konektivitas
4. Pembangunan daerah yang berkelanjutan
5. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah

Perumusan Visi Kota Manado mencerminkan apa yang ingin dicapai dengan memberikan arah dan fokus strategi yang jelas yang mampu menjadi perekat komponen kota Manado yang memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan suatu organisasi.

**3.3 Telaahan Renstra K/L**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado di tujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Manado dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Renstra Kementerian / Lembaga ; dan
2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kota Manado melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara atau Renstra Kementerian/Lembaga.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Salah satu rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota manado diantaranya adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado ikut berpartisipasi dengan pengembangan pengelolaan keuangan yang menggunakan sistem aplikasi online. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat luas wilayah Kota Manado sangat besar sehingga membutuhkan sarana untuk mendapatkan informasi dan pelayanan pengelolaan keuangan secara cepat dan tepat.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Isu isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang berbasis kinerja
2. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan
3. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan
4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam kaitannya dengan Misi 5 “Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah”. Tujuan Misi 5 “Terwujudnya Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Capaian Reformasi Birokrasi” Sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintah Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja”. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja”. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan BKAD,
2. Meningkatnya Kapasitas, Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Manado

Adapun secara terperinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BKAD selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 tergambar dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Berbasis Kinerja	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan BKAD	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi BKAD	75	80	85	90	95
		2. Meningkatkan Kapasitas, Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Manado	1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran yang Tepat Proses, Mekanisme dan Waktu	100	100	100	100	100
			2. Persentase Penatausahaan Keuangan yang Tepat Proses, Mekanisme dan Waktu	100	100	100	100	100
			3. Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Yang Berkualitas dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
			4. Persentase PD yang Tepat Proses, Mekanisme dan tertib permuktahiran data BMD	100	100	100	100	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapai kondisi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI :			
"Manado Maju dan Sejahtera Sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia Ke Asia Pasifik"			
MISI 5 :			
"Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Berbasis Kinerja	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan BKAD	Peningkatan kinerja pelayanan BKAD	Meningkatkan ketaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan
	2. Meningkatnya Kapasitas, Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Manado	Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
		Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
		Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi aset	Meningkatkan kualitas perencanaan , pengadaan dan distribusi aset
			Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah dibahas sebelumnya, maka dilanjutkan dengan merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dalam rangka menunjang pemenuhan target sasaran yang telah ditetapkan.

BKAD Kota Manado dalam periode ini merencanakan sebanyak 3 program, yang terbagi menjadi 1 program rutin dan 2 program pokok, sementara itu untuk kegiatan selang 5 tahun ini direncanakan sebanyak 14 kegiatan dan 81 Sub kegiatan yang tersebar waktu pelaksanaannya.

Secara terperinci program dan kegiatan BKAD selama 5 Tahun ke depan tersaji dalam bentuk tabel 6.1.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado**  
**Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kodefikasi						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome); Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																					
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra									
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTABUKITING	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	48,337,977,118	-	44,321,797,140	-	49,356,394,044	-	54,313,573,249	-	60,319,701,344	-	65,775,157,864	-	75,641,431,544								
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKAD	-	75	315,915,800	75	249,975,000	75	430,796,005	75	495,415,406	75	569,727,717	75	655,186,874	75	753,464,905								
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	-	100%	44,574,523,268	100%	41,133,894,740	100%	45,267,381,529	100%	49,794,119,682	100%	54,773,531,650	100%	60,250,884,815	100%	69,288,517,537								
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase ASN BKAD Berkinerja Baik	-	100%	75,960,000	100%	75,960,000	100%	87,354,000	100%	96,089,400	100%	105,698,340	100%	116,268,174	100%	133,708,400								
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN BKAD Berkinerja Baik	-	100%	288,617,100	100%	633,759,100	100%	728,822,965	100%	801,705,262	100%	881,875,788	100%	970,063,366	100%	1,115,572,871								
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase ASN BKAD Berkinerja Baik	-	100%	1,261,914,450	100%	1,111,185,500	100%	1,277,863,325	100%	1,405,649,658	100%	1,546,214,623	100%	1,700,836,086	100%	1,955,961,498								
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ASN BKAD Berkinerja Baik	-	100%	551,996,900	100%	61,798,000	100%	71,067,700	100%	78,174,470	100%	635,991,917	100%	94,591,109	100%	108,779,775								
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ASN BKAD Berkinerja Baik	-	100%	342,320,000	100%	309,860,000	100%	360,939,000	100%	397,032,900	100%	436,736,190	100%	480,409,809	100%	552,471,280								
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ASN BKAD Berkinerja Baik	-	100%	926,729,600	100%	745,364,800	100%	1,132,169,520	100%	1,245,386,472	100%	1,369,925,119	100%	1,506,917,631	100%	1,732,955,276								
								2. Manajemen Keuangan		5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Manajemen Keuangan	-	Ya	41,974,378,252	Ya	65,605,371,033	Ya	77,281,718,518	Ya	88,690,380,976	Ya	101,714,278,852	Ya	116,646,285,060	Ya	134,143,227,819
																Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Apakah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Mempengaruhi Laporan Keuangan	-	Ya	2,851,458,400	Ya	1,919,604,300	Ya	3,390,919,400	Ya	3,899,557,310	Ya	4,484,490,907	Ya	5,157,164,542	Ya	5,930,739,224
																Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Apakah Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Mempengaruhi Laporan Keuangan	-	Ya	1,086,190,700	Ya	1,214,968,400	Ya	1,606,471,100	Ya	1,847,441,765	Ya	2,124,558,030	Ya	2,443,241,734	Ya	2,809,727,994
																Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Apakah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksana	-	Ya	1,624,202,800	Ya	1,636,564,100	Ya	2,241,388,800	Ya	2,394,001,800	Ya	2,473,442,800	Ya	2,519,323,600	Ya	2,897,222,140
																Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Apakah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Mempengaruhi Laporan Keuangan	-	Ya	35,718,721,652	Ya	60,625,553,233	Ya	69,719,386,218	Ya	80,177,294,151	Ya	92,203,888,273	Ya	106,034,471,514	Ya	121,939,642,241

		5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Apakah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Mempengaruhi Laporan Keuangan	-	Ya	693,804,700	Ya	208,681,000	Ya	323,553,000	Ya	372,085,950	Ya	427,898,843	Ya	492,083,669	Ya	565,896,219
	3. Manajemen Aset							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset															
		5	02	03						-	Ya	1,398,469,900	Ya	1,700,478,400	Ya	2,164,176,900	Ya	2,488,803,435	Ya	2,862,123,950	Ya	3,291,442,543	Ya	3,785,158,924
		5	02	03	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	-	Ya	1,398,469,900	Ya	1,700,478,400	Ya	2,164,176,900	Ya	2,488,803,435	Ya	2,862,123,950	Ya	3,291,442,543	Ya	3,785,158,924

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BKAD Kota Manado dengan Dokumen RPJMD Kota Manado Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BKAD Kota Manado harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BKAD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Manado, BKAD selaku PD penunjang fungsi keuangan daerah berkontribusi untuk mewujudkan pemenuhan Misi 5 “Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Didukung Oleh Sinergitas Antar Daerah”. Tujuan Misi 5 “Terwujudnya Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Capaian Reformasi Birokrasi” Sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintah Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja”. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yaitu “Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja”.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja BKAD selanjutnya dijabarkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi BKAD	-	80	85	90	95	95	95
3	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran yang Tepat Proses, Mekanisme dan Waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penatausahaan Keuangan yang Tepat Proses, Mekanisme dan Waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Yang Berkualitas dan Tepat Waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Perangkat Daerah yang tepat proses, mekanisme dan tertib pemutakhiran data Barang Milik Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Manado untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja (Renja) PD.

Semoga dokumen Renstra BKAD ini dapat membantu mewujudkan segala cita-cita dan upaya Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Manado yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA MANADO,

PETER K. B. ASSA, ST.,M.Sc.,Ph.D  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670515 199403 1 003



BKAD  
KOTA MANADO